



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

# **RENCANA KERJA 2024**

**Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb 77311 Kabupaten Berau  
Provinsi Kaltim**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau ini dapat diselesaikan baik sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Hal ini sebagai acuan dan pedoman serta gambaran dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau guna mendukung dalam pencapaian kinerja perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Berau, sehingga pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Februari 2024

  
Kepala,  
**H. DIDI RAHMADI, S.SOS, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680811 199503 1 003

# Daftar Isi

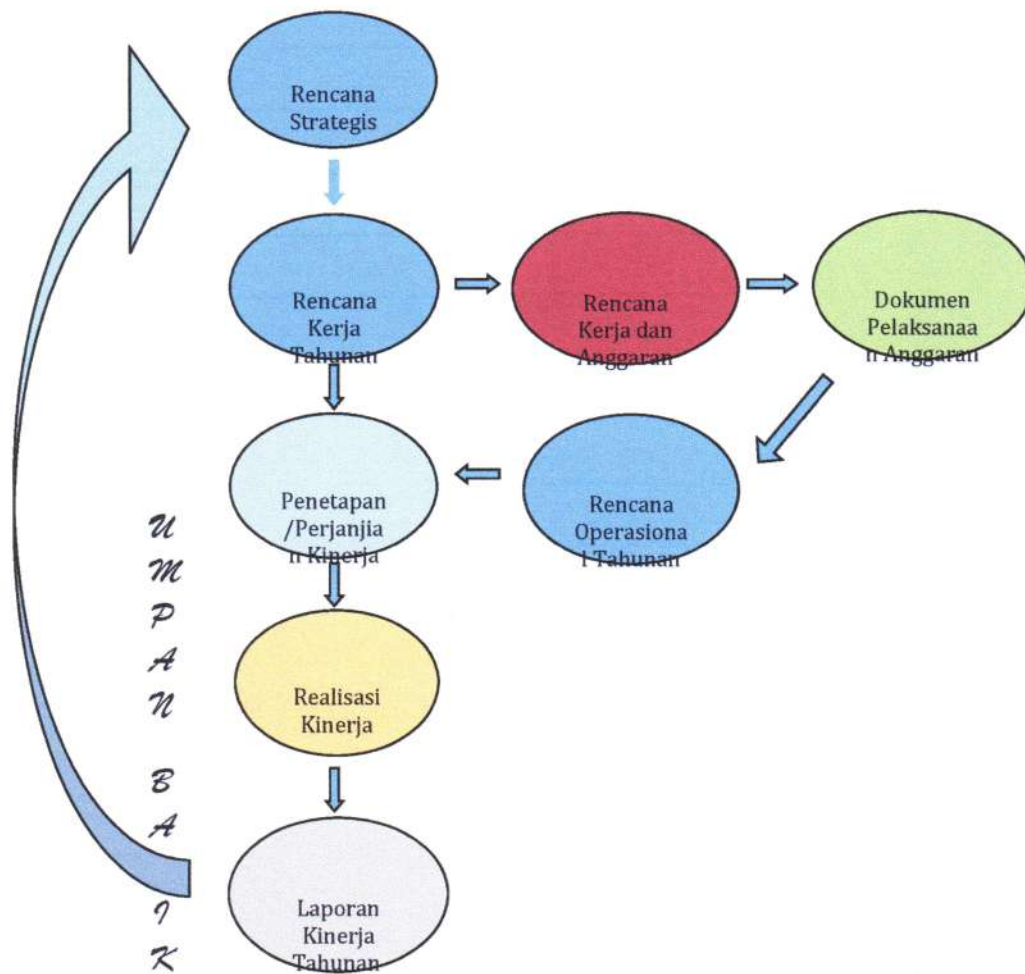
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Kepegawaian.....	3
1.2 Latar Belakang.....	4
1.3 Landasan Hukum.....	6
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra.....	9
BAB III.....	16
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	17
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	18
BAB IV.....	21
PENUTUP.....	21
4.1 Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Renstra 2021-2026.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Gambar 1.1



Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra selanjutnya, diidentifikasi sasaran mana yang akan di wujudkan pada tahun 2024 beserta indikatornya dan rencana tingkat capaiannya targetnya.

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi, informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan juga melaksanakan urusan pemerintah bidang Statistik Sektoral dan Persandian serta melaksanakan pelayanan teknis administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkannya Peraturan Bupati No.64 tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau, selanjutnya dilakukan Revisi Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat(2) Peraturan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan

### 1.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki pegawai sebanyak 38 orang Aparatur Sipil Negara. Dari jumlah pegawai sebanyak 38 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 orang dan Jabatan Fungsional 14 orang serta pelaksana sebanyak 17 orang.

Tabel 1.1  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		3			3
4	Jabatan Fungsional			14		14
5	Kepala Sub.Bag			2		2
6	Staf				17	17
	Jumlah	1	4	16	17	38

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berdasarkan yang di miliki, dapat di lihat tabel 1.2.

Tabel 1.2  
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang	1	2				3
4	Jabatan Fungsional	1	12	1			14
5	Kepala Sub.Bag		1	1			2
6	Staf		6		11		17
	Jumlah	2	23	2	11		38
	%	7,9 %	50 %	5,3 %	34,2 %	2,6 %	100 %

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

*Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, sebanyak 2 orang (5%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 23 orang (61%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (5%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 11 orang Staff (29%).*

## **1.2 Latar Belakang**

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun sistem Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran komunikasi sangatlah penting Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dengan melalui visi dan misinya sebagai berikut:

#### **A. Visi Kabupaten Berau**

*"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"*,

#### **B. Misi Kabupaten Berau**

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Visi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu *"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"* dalam RPJMD tahun 2021-

2026, Sehingga Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau untuk melaksanakan rencana kerja lima tahun yang kemudian dilaksanakan setiap tahun melalui rencana kerja tahunan.

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berupaya melaksanakan rencana program, Kegiatan dan Sub sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang diproyeksikan dan diselaraskan sebagaimana ada dokumen Rencana Strategis.

### **1.3 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2022 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perpres No.29 Tahun 2014 Tentang SAKIP
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang 7 Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2010 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati No.64 tahun 2016 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
20. Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

#### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah:

- 1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2024.
- 2) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan Renja.

- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra.

- BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, sasaran Renja SKPD, Program, dan Kegiatan

- BAB IV Penutup

Berisi Kesimpulan dari rencana kinerja tahunan

- Lampiran

Berisi Lampiran Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2024, dan lampiran lainnya.

## BAB II

### Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) Urusan Wajib yaitu Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintah bidang Statistik dan Urusan Pemerintah Bidang Persandian dan bukan pelayanan dasar.

Sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan TA. 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2023	
			K	Rp.	K	Rp.	K	%
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		7.992.400.606		7.255.023.886		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		322.959.000				
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	3	115.999.600	3,00	94.021.981	95,00	81,05
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	5	84.999.800	5,00	75.535.369	100,00	88,87
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	12	121.959.600	11,40	91.419.798	95,00	74,96
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Administrasi perkantoran		5.807.847.854				
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	12	5.480.425.266	12	4.981.540.330	100,00	90,90
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi perencanaan dan keuangan yang dibayar	12	327.422.588	12	318.427.708	100,00	97,25



2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	93.000.000	11,40	48.719.710	60,00	52,39
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	51.559.676	12	47.809.476	100,00	92,73
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>2.606.013.840</b>	-	<b>2.369.826.334</b>	-	-
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang terkelola dengan baik</b>		<b>2.606.013.840</b>				
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik	2	74.420.000	2,00	69.288.333	100,00	93,10
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan Hasil Monitoring Isu Publik yang Dikelola Dengan Baik	2	38.819.000	1,80	28.620.850	90,00	73,73
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Data /Informasi terkait Kewenangan Pemda yang Menjadi Agenda Prioritas Pemerintah	13	74.520.800	11,00	62.714.126	84,62	84,16
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Pemda yang dikelola dengan baik	6	979.522.000	6,00	957.133.060	100,00	97,71
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi yang diberikan dan dikelola dengan baik	425	275.684.460	425	272.634.403	100,00	98,89
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kunjungan ke Media, Pertemuan sekaligus memantau siaran pers di media, melaksanakan liputan media/ siaran pers	9	152.480.000	9	141.367.000	95,56	92,71
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan serta terjalannya kerja sama yang baik antara OPD dan Pemangku Kepentingan	3	49.008.000	3	46.391.000	96,67	94,66
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang dilatih	75	300.000.000	60	231.384.500	80,00	77,13
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Kemitraan Komunitas	2	661.559.580	2	560.293.062	95,00	84,69
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Peningkatan Index SPBE di lingkungan Pemkab Berau</b>		<b>12.577.728.336</b>		<b>9.263.817.160</b>		
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terterselenggaranya Pengelolaan Domain dan sub domain Pemerintah daerah dengan baik</b>		<b>11.012.492.336</b>	-			
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	498	11.012.492.336	498,00	7.811.380.425	79,80	70,93
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terterselenggaranya Pengelolaan e-Government dengan baik pada Pemerintah Daerah</b>		<b>1.565.236.000</b>	-			
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	597.282.000	1,00	569.767.866	100,00	95,39
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Basis Data Pemerintah Daerah	2	169.995.000	2,00	143.645.250	100,00	84,50
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Bandwidth	12	387.959.000	12	364.490.796	100,00	93,95
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi	Tersedianya Aplikasi	1	360.000.000	1,00	336.514.273	100,00	93,48

					dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik							
2	16	03	2.02	09	engembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tersusunnya Dokumen Smart City	1	50.000.000	1,00	38.018.550	100,00	76,04
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Tersedianya Data Statistik Sektoral dalam Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>		<b>538.810.000</b>		<b>421.292.300</b>		
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah</b>		<b>538.810.000</b>				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	135.000.000	1,00	93.787.448	80,00	69,47
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis Bidang Statistik	20	87.500.000	15,00	54.778.446	75,00	62,60
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Metadata Statistik Sektoral	1	117.310.000	1,00	94.248.656	100,00	80,34
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Peran dan Fungsi Perangkat Daerah yang Menjalankan Fungsi Statistik	50	33.000.000	50,00	25.850.600	100,00	78,34
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	166.000.000	1,00	152.627.150	100,00	91,94
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>551.720.000</b>		<b>450.065.460</b>		
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah</b>		<b>481.880.000</b>				
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	47	303.440.000	42,00	246.426.214	89,36	81,21
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah	47	178.440.000	42,00	144.371.946	89,36	80,91
2	21	02	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>69.840.000</b>				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	47	69.840.000	42,00	59.267.300	89,36	84,86
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>							<b>Total Anggaran (Rp)</b>	<b>24.266.672.782</b>	<b>Total Realisasi (Rp)</b>	<b>19.760.025.140</b>		
											<b>91,00</b>	<b>81,43</b>

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang dimaksud tabel diatas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau berupaya maksimal untuk memaksimalkan target capaian kinerja yang baik, mengingat Tahun Anggaran 2023 adalah tahun ke-3 dari Rencana Starategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2021-2026.

Sebagai bagian dari upaya dan langkah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja yang baik adalah selalu berkoordinasi dengan pihak Baplitbang Kabupaten Berau khususnya bidang Pengendalian Data dan Informasi dan Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Berau, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, dan Inspektorat Kabupaten Berau terkhusus Inspektur Wilayah IV sebagai garis koordinasi pembina dan pengawasan agar Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi semakin baik kedepan.

Hasil capaian dari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana target dan hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau secara keseluruhan untuk realisasi fisik diperoleh presentase 91,00% dan serapan anggaran 81,43,% sebagaimana yang telah dipaparkan di Semester II atau triwulan IV pada ekpose kinerja semua forum SKPD pada januari 2023 diruang rapat Baplitbang Kabuapten Berau evalausi raihan positif dengan kategori Kinerja Sangat Baik (Sangat Tinggi)

Selanjutnya disampaikan juga terkait Hasil Akhir perencanaan strategis Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD sebagai Berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target awal Tahun 2023	Hasil Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang TIK		Cakupan layanan Telekomunikasi			
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis TIK	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,02
		Menyebarluaskan dan memberikan pelayanan informasi antar	Cakupan layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase	85	88,5

		perangkat daerah				
2.	Meningkatkan pelayanan persandian dalam rangka pengamanan Informasi		Presentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah			
		Terwujudnya Kemananan data dan informasi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	30	42
3.	Meningkatnya Kualitas data stasistik sektoral		Presentase pemanfatan dat untuk perencanaan pembangunan			
		Tersedianya Data stasistik sektoral yang berkualitas	Presentase Perangkat daerah yang mennggunakan data stasistik daerah	Presentase	80	89

Salah Satu Capaian dari Program Prioritas dari Bupati Berau Bupati Berau dari 18 program Bupati Berau adalah penyediaan Wifi gratis diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau yang mana tahun anggaran 2023 telah terpasang 498 Titik Wifi yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya sebanyak 502 titik wifi sehingga total titik wifi yang sudah terpasang sebanyak 1000 titik wifi.

Pada Program Penyelenggaran Stasistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sudah melaksnakan Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait pemenuhan data sebagaimana pada matrik yang ada diatas bersama pada lintas Sektroor yakni Bapalitbang Kabupaten Berau dan BPS Kabupaten Berau sebagai Pembina Stasistik terhadap data Pembangunan Daerah

Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2023 sudah mulai ada peningkatan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasana kantor untuk mendukung

pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Disamping itu pula tahun 2023 peningkatan Sumber daya Manusia awak media atau jurnalis dari perwakilan OPD untuk memperdalam ilmu tentang kejournalisan dan pada tahun yang sama di bidang Pelayanan informasi dan Komunikasi Publik melakukan sosialisasi tentang Sp4m Laport yang diikuti hampir sebagian Organisasi Perangkat Daerah untuk yang seperti apa mekanisme layanan aduan dari masyarakat untuk dapat dilaksanakan dan diproses secara baik sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui layanan aduan pemerintah dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik kepada Instansi terkait sehingga diperoleh kepuasan oleh masyarakat yang telah dilakukan ini kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan terkait.

Pada Program Pengamanan Persandian semua Aplikasi dan Web Site serta Email yang ada pada saat ini pada dasarnya sudah memiliki tingkat keamanan masing-masing baik yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah ataupun yang sudah dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mendukung program nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Standar Pelayanan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika SPM KOMINFO Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Indeks Kinerja Kunci (IKK) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Berdasarkan Peraturan Bupati No.42 tahun 2023 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

#### ➤ Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- Kepala Dinas

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamnan Inforamsi  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025, maka dapat di lihat pada Tabel 3.3 yang ada di lampiran laporan.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### **4.1 Rencana Kinerja Diskominfo Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Renstra 2021-2026**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Rencana kinerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2021 – 2026).

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan adanya evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kabupaten Berau merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini maka Diskominfo Kabupaten Berau harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kabupaten Berau dengan senantiasa

- Sekretaris, membawahi:
  - a. Kasubbag Penyusunan Program
  - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Membawahkan Jabatan Kelompok Fungsional ;
- Bidang Aplikasi Informatika membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Persandian dan Stasistik , membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau pada tanggal 31 Desember 2021 telah melaksanakan peraturan Menteri (Permen) PANRB nomor 287 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kejabatan Fungsional , diman ruang lingkup Penyetaraan jabatan termasuk jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional yang ini juga dilakukan secara serentak oleh Provinsi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia sehingga terdapat 13 Jabatan Kasi/ Kasubag yang dilakukan penyetaraan jabatan ke fungsional sementara saat ini hanya menyisakan 2 Kasubag yang tidak termasuk kedalam jabatan penyetaraan tersebut yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan dan Aset. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh pejabat yang disetarakan akan berstatus sebagai Sub Koordinator pada sub kegiatan yang diemban pada tupakosi yang masih melekat pada saat ini.

➤ **Pelaksanaan Teknis Dinas**

- **Tugas Pokok:**  
Melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- **Fungsi:**
  - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
  - b. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, dan Bidang Persandian dan Statistik.
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi Penyusunan Program serta administrasi Keuangan dan Aset.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

- mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sinergitas pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Berau.
- b. Menciptakan kolektivitas pendayagunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Berau.
- c. Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
- d. Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- f. Mewujudkan terlaksananya keterbukaan informasi publik.

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai, adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang sesuai dengan norma dan standar kualitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Tersedianya prosedur dan tata kerja komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
  - Penyediaan peraltan dan perelengkapan kantor
  - Penyediaan perlatan rumah tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik

- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan Bahan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat- Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas Operasional atau lapangan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- II. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas
- III. Program Aplikasi Informatika
- a. Pengelolaan Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
  - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah daerah
- IV. Program Penyelenggaraan Stasistik Sektoral
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Stasistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan diseminisasi data stasistik sektoral
- V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas Yang dibutuhkan Masyarakat baik yang berskala local, regional, dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk-produk teknologi informasi dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Kabupaten Berau.

Adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tanjung Redeb, Februari 2024

  
**Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Berau**  
**Kepala,**  
  
**H. DIDI RAHMADI, S.S.SOS, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680811 199503 1 003

Lampiran (Renja OPD)  
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(1)	(2)	(3)	(4)	RENCANA TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	
2	16	01	2.01	1	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Peningkatan Urusan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	3	dokumen	Rp7.497.038.830		3	dokumen	Rp7.779.860.000
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau			Rp385.400.000				Rp400.000.000
2	16	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	3	dokumen	Rp75.400.000		3	dokumen	Rp80.000.000



2	16	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	1	doku men	Rp42.350.000		1	doku men	Rp46.585.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau			Rp122.350.000				Rp145.000.000
2	16	01	2.05	2	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaiain Dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	60	stel	Rp42.350.000		60	stel	Rp45.000.000
2	16	01	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	16	orang	Rp80.000.000		16	orang	Rp100.000.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Mutu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau			Rp283.967.750				Rp312.326.025
2	16	01	2.06	1	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp4.235.000		12	bulan	Rp4.620.000

2	16	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	5	jenis	Rp45.350.000		5	jenis	Rp48.585.000
2	16	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp4.356.000		12	bulan	Rp4.791.000
2	16	01	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedainya nahan logistik kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp60.000.000		12	bulan	Rp64.000.000
2	16	01	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	5	jenis	Rp8.681.000		5	jenis	Rp9.549.000
2	16	01	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp5.000.000		12	bulan	Rp5.500.000
2	16	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp250.000.000		12	bulan	Rp250.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujng Urusan	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik	Dinas Komunikasi			Rp630.000.000				Rp655.000.000

					Pemerintah Daerah	Daerah Untuk Memnujng Urusan Pemerintah	dan Informatika Kabupaten Berau										
2	16	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	1 Unit Roda 4 & 2 Unit Roda 2		Rp600.000.000		1 Unit Roda 4 & 2 Unit Roda 2		Rp625.000.000			
2	16	01			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	1 jenis		Rp30.000.000		1 jenis		Rp30.000.000			
		01					Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau										
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau			Rp190.902.250				Rp200.463.975			
2	16	01	2.08		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	30 lemb ar		Rp3.630.000		300 lemb ar		Rp3.990.000			
2	16	01	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12 bulan		Rp120.000.000		12 bulan		Rp125.000.000			
2	16	01	2.08	3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi dan	2 jenis		Rp12.200.000		2 jenis		Rp13.400.000			

2	16	01	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp80.616.000		12	bulan		Rp88.677					
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeiharanya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau			Rp211.185.000					Rp226.513.000					
2	16	01	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	2	unit	Rp37.307.000		2	unit		Rp40.928.000					
2	16	01	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	3 unit roda 4 dan 17 unit roda 2		Rp95.986.000		3 unit roda 4 dan 17 unit roda 2			Rp105.585.000					
2	16	01	2.09	9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau	12	bulan	Rp77.892.000		12	bulan		Rp80.000.000					
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>4.216.025.000</b>				<b>4.466.322.500</b>						

2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>951.250.000</b>				<b>1.028.812.500</b>
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Berau	43	doku men	400.000.000		440	doku men	450.000.000
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Berau	75	orang	275.625.000		75	orang	289.406.250
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten Berau	5	doku men	275.625.000		5	doku men	289.406.250
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>3.264.775.000</b>				<b>3.437.510.000</b>
2	16	02	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Berau	4	doku men	187.500.000		2	doku men	196.871.250
2	16	02	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	RUMUS: 1. Jumlah Informasi dan KIM berbasis IT/Jumlah KIM 2. Jumlah Informasi yg diupload diwebsite/Jumlah Informasi yg ada 3. Jumlah informasi yg diupload diweb diskominfo/jumlah informasi yg ada 4. Jumlah Informasi yg di upload di medsos pemda/Jumlah informasi yg ada 5. Jumlah informasi yang dilaksanakan secara virtual di room teleconference 6.	Kabupaten Berau	13	laporan/13 k2ca matan	220.500.000		13	laporan/13 k2ca matan	231.525.000





2	16	02	201	8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kemitraan dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan	Kabupaten Berau	4	kelompok masyarakat dan Pemangku kepentingan	220.500.000	5	kelompok masyarakat dan Pemangku kepentingan	231.525.000
2	16	02	201	9	Manajemen Komunikasi Krisis	RUMUS: 1. Jumlah informasi dan KIM berbasis IT/Jumlah KIM 2. Jumlah Informasi yg diupload diwebsite/Jumlah Informasi yg ada 3. Jumlah informasi yg diupload diweb diskominfo/Jumlah informasi yg ada 4. Jumlah Informasi yg di upload di medsos pemda/Jumlah informasi yg ada	Kabupaten Berau	8	laporan	220.500.000	10	laporan	231.525.000
2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	RUMUS: 1. Jumlah Informasi dan KIM berbasis IT/Jumlah KIM 2. Jumlah Informasi yg diupload diwebsite/Jumlah Informasi yg ada 3. Jumlah Informasi yg diupload diweb diskominfo/Jumlah informasi yg ada 4. Jumlah Informasi yg di upload di medsos pemda/Jumlah informasi yg ada	Kabupaten Berau	2	Media dan Komunitas	1.102.500.000	2	Media dan Komunitas	1.157.625.000





2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Adanya aplikasi yang saling terintegrasi	Kabupaten Berau	2	aplikasi	210.000.000		2	aplikasi	210.000.000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tertaksananya pembangunan Comen center dan dokumen Smart City	Kabupaten Berau	1	dokumen	3.000.000.000		1	dokumen	3.000.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya teknologi Informasi dan komunikasi pemerintah Daerah	Tertaksananya Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya TIK	Kabupaten Berau	30	orang	315.000.000		30	orang	315.000.000
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Governmen CHIEF Information Officef ( GCIO)	Tertaksananya Bimtek dan sertifikasi TIK	Kabupaten Berau	50	orang	50.000.000		50	orang	50.000.000
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	- Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik daerah								
						- Rasio Jumlah Data Statistik Sektoral								
						- Tersedianya data statistik dalam mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah								
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah				1.708.875.000				1.794.318.750
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedia data statistik sektoral	Kabupaten Berau	1	dokumen	441.000.000		1	dokumen	463.050.000

2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi Teknis Bidang Statistik	Kabupaten Berau	50	orang	165.375.000		50	orang	173.643.750
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Berau	1	doku men	275.625.000		1	doku men	289.406.250
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Peran dan Fungsi Perangkat Daerah yang menjalankan Fungsi Statistik	Kabupaten Berau	50	orang	220.500.000		50	orang	231.525.000
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Terbangunnya Infrastruktur Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Kabupaten Berau	1	peralatan/sistem	441.000.000		1	peralatan/sistem	463.050.000
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral , Terjaminnya kredibilitas data statistik sektoral	Kabupaten Berau	1	doku men	165.375.000		1	doku men	173.643.750
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	- Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah - Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE				1.628.125.000				1.697.031.250
2	21	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah				1.378.125.000				1.447.031.250
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Tersedianya kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi	Kabupaten Berau	1	doku men	165.375.000		1	doku men	173.643.750

